



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Senayan: idealnya Rp 11 Ribu Per Liter
Tanggal : Minggu, 09 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Senayan: Idealnya Rp 11 Ribu Per Liter

ANGGGOTA Komisi VI DPR Amin Ak menilai, harga minyak goreng kemasan sederhana yang dijual Pemerintah harusnya bisa di angka Rp 11.000 per liter.

"Ini mengacu pada Permen dag Nomor 7/2020, yang mengatur harga minyak goreng Rp 12.500 per kilogram. Kalau diliterkan sekitar Rp 11.000 per liter," kata Amin, di Jakarta, Jumat (7/1).

Ia juga mempertanyakan rencana Pemerintah mensubsidi 2 juta ton minyak goreng curah atau sekitar 25 persen dari total konsumsi minyak goreng nasional 8 juta ton per tahun. Jika dikonversikan, subsidi 1,2 miliar liter baru sekitar 900 ribu ton. Jumlah ini jauh di bawah rencana awal di angka 2 juta ton.

"Kalau pun subsidi diperpanjang dari enam bulan menjadi setahun, atau dari 1,2 miliar liter menjadi 2,2 miliar liter, besaran subsidi hanya sekitar 1,8 juta ton atau masih lebih rendah dari rencana awal," papar politisi PKS itu.

Amin juga memastikan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tidak terbebani dengan subsidi yang dikucurkan Pemerintah untuk minyak goreng ini.

Pasalnya, dana subsidi diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berasal dari pungutan ekspor, yang dipungut dari produsen minyak sawit mentah atau dikenal dengan *CPO Supporting Fund (CSF)*.

Dana ini dibayarkan produsen CPO saat harga komoditas di atas 570 dolar AS per ton. Untuk diketahui, hingga 17 Desember 2021, BPDPKS berhasil menghimpun dana senilai Rp 69,72 triliun.

Selain itu, pada 2022 pendapatannya diperkirakan mencapai sekitar Rp 45 triliun.

"Sehingga lebih dari cukup untuk menerapkan besaran subsidi sesuai komitmen awal," tegasnya.

Sementara, pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafni mengatakan, dengan Pemerintah mengurangkan minyak goreng kemasan sederhana, akan menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang stabil.

"Namun Pemerintah juga harus menyusun strategi distribusinya dengan matang. Sehingga program ini benar-benar dapat mengurangi disparitas harga dan stok antar daerah yang terlampaui jauh," kata Rahma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/1).

Ia melanjutkan, adanya kebijakan ini juga sangat membantu sektor usaha makanan dan minuman. Terutama yang berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengurangi *cost of production*.

"Dengan hadirnya minyak dengan harga terjangkau, akan tercapai efisiensi produksi di usaha makanan dan minuman yang di dominasi UMKM," tegas Rahma. ■ NOV